

---

## BAB V

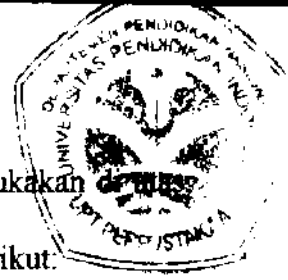
### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pengolahan dan analisis data yang seksama, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan politik di pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri<sup>2</sup> berpijak pada amanat K.H. Ahmad Faqih, yaitu: “Santri jangan diam dalam menghadapi persoalan politik”. Ini berarti, bahwa santri harus proaktif dalam menghadapi persoalan politik dan menentukan sikap yang tepat dan bermanfaat untuk umat. Amanat tersebut berimplikasi luas baik terhadap generasi penerus pesantren maupun para santri dan alumni, terutama dalam menghadapi dan menyikapi perkembangan politik yang terjadi, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri.
2. Kuatnya pengaruh kiai sebagai tokoh panutan, tingginya keterlibatan santri dalam berorganisasi, dan besarnya minat santri dalam membicarakan (diskusi) masalah-masalah aktual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, merupakan potensi yang besar bagi pondok pesantren untuk melaksanakan pendidikan politik. Kendala yang dialami dan dihadapi, selain karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami tentang politik dan sistem politik yang berlaku, kurangnya buku sumber, dan minimnya jaringan informasi dan komunikasi, juga karena padatnya waktu pengajian untuk mengejar target penguasaan/pemahaman kitab kuning.

- 
3. Untuk terlaksananya pendidikan politik di pondok pesantren, pengaruh kepemimpinan kiai sangat menentukan. Artinya, bisa tidaknya dilaksanakan pendidikan politik di pondok pesantren tergantung dari *political will* kiai sebagai figur sentral di pesantren. Dengan demikian, dalam pendidikan politik di pondok pesantren, kiai berperan sebagai penentu dan sekaligus pelaksana kebijakan. Di pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri<sup>7</sup> peranan tersebut tidak dipegang oleh seseorang kiai tetapi oleh seluruh pengurus dewan kiai secara kolektif. Hal ini menunjukkan adanya pegeseran dari generasi pertama (K.H. Ahmad Faqih) sebagai pendiri, di mana perannya sangat menentukan. Sementara pada generasi kedua, walaupun tetap menghargai yang lebih tua, penentuan kebijakan pesantren dilakukan secara kolektif melalui musyawarah dewan kiai. Kondisi ini merupakan salah satu faktor penting tetap stabilnya pesantren, bahkan terus berkembang walaupun sudah ditinggalkan oleh pendirinya.
  4. Pendidikan politik di pondok pesantren diarahkan dan dikembangkan secara terintegrasi (terpadu) dengan kegiatan pesantren. Sesuai dengan latar sosial budaya pesantren, maka cara yang relevan bagi pondok pesantren untuk melaksanakan pendidikan politik yaitu melalui pengajian, keteladanan, kedisiplinan, organisasi, kaderisasi/kepemimpinan, latihan pidato/ceramah, diskusi, musyawarah, dan *bahtsul masa'il*. Adapun materinya hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik Islam, sistem politik Indonesia, dan persoalan-persoalan sosial politik aktual.



## B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan peneliti memandang perlu memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Implementasi dari amanat pendiri pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri' K.H. Ahmad Faqih (Alm) agar "santri jangan diam dalam menghadapi persoalan politik", sebagai dasar atau pijakan pendidikan politik, pelaksanaannya masih sederhana dan cenderung apa adanya (belum optimal). Untuk itu perlu ditingkatkan, agar ketika santri terjun ke masyarakat (*mukim*) tanggap terhadap persoalan sosial politik yang terjadi dan dapat menyikapinya secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan umat. Hal ini karena persoalan da'wah di masyarakat cukup kompleks, bukan hanya persoalan ibadah saja, tetapi juga masalah-masalah lain termasuk masalah politik yang perlu mendapat perhatian santri dan kiai. Untuk meningkatkan pendidikan politik di pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri' di antaranya: *Pertama*, mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, antara lain latihan pidato, debat dan diskusi, musyawarah, *bahtsul masa'il*, organisasi dan kepemimpinan. *Kedua*, diadakan pendidikan politik secara kontinu dan berkala (misalnya seminggu sekali) terutama untuk kelas Ma'had 'Aly dan Dirosatul 'Ulya. *Ketiga*, diadakan diskusi atau ceramah umum minimal sebulan sekali baik dari pihak pesantren sendiri, pimpinan ormas Islam maupun para akademisi atau pakar politik yang membahas tentang persoalan sosial politik aktual.
2. Peneliti memandang, bahwa Organisasi Santri Miftahulhuda Al Musri' (OSMA) merupakan salah satu sarana paling efektif untuk pelaksanaan pendidikan politik. Untuk itu pembinaannya perlu ditingkatkan, di antaranya dengan cara diadakan

- 
- latihan kepemimpinan santri terutama untuk para pengurus OSMA, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal baik bagi santri sendiri maupun bagi pesantren secara kelembagaan.
3. Tantangan kehidupan ke depan akan semakin berat dan kompleks sebagai dampak dari globalisasi kehidupan yang berkembang dengan pesat. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tidak dapat menghindari dari kenyataan tersebut. Untuk menghadapi tantangan itu, program yang disusun secara sistematis dan komprehensif sangat diperlukan di pondok pesantren sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan dan evaluasi, juga sebagai bahan/sumber informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Sementara di pesantren Miftahulhuda Al Musri<sup>7</sup> program pondok pesantren, baik program pembelajaran (kurikulum), program jangka pendek (1 tahun), program jangka menengah (5 tahun), dan program jangka panjang 25 tahun ke depan belum tersusun secara sistematis. Kegiatan pondok pesantren cenderung hanya menjalankan program yang sifatnya rutinitas dan berjalan apa adanya sesuai dengan tradisi, situasi dan kondisi yang ada. Kalaupun ada pembaharuan/terombosan sifatnya spontanitas dan tidak tertulis secara sistematis, cukup dimusyawarahkan oleh para dewan kiai. Untuk itu penyusunan program yang sistematis, komprehensif, dan terukur perlu mendapat perhatian dari para pengelola pesantren.
  4. Dalam rangka membina akidah masyarakat sekitar pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri<sup>7</sup> dari misi agama lain, kegiatan pengajian keliling para santri perlu diintensifkan termasuk upaya merangkul generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan pesantren (*masantren*). Karena berdasarkan pengamatan, keterlibatan generasi muda sekitar pesantren untuk mengikuti pengajian masih rendah. Pengajian

---

keliling ini bukan hanya merupakan pengabdian santri/pesantren terhadap masyarakat sekitar, tetapi juga merupakan sarana pembelajaran yang efektif untuk memahami berbagai masalah sosial.

5. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan model (contoh) oleh pesantren lain, di antaranya: *Pertama*, sistem kepemimpinan kiai secara kolektif, di mana dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pesantren dilakukan secara bersama melalui musyawarah dewan kiai, sehingga walaupun sudah ditinggalkan oleh pendirinya, pesantren tetap stabil bahkan terus berkembang. *Kedua*, sistem pendidikan di pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri' dengan menggunakan metode pembelajaran yang cepat dan padat (Al Musri'), sehingga santri dapat dengan cepat menguasai kitab kuning.
6. Ormas Islam terutama NU sebagai organisasi yang menempatkan pesantren sebagai salah satu pilar utamanya perlu meningkatkan fungsi dan perannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan secara berkala dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pokok pondok pesantren. Demikian pula pemerintah seyogianya memfasilitasi atau memberi kemudahan, terutama dalam pengadaan buku-buku sumber.
7. Para tokoh politik (politisi), tokoh masyarakat, maupun pejabat perlu mengembangkan etika politik yang elegan dengan berbasis moral agama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga segala sikap dan perbuatannya dapat menjadi sarana pembelajaran pendidikan politik yang efektif.
8. Para akademisi dan praktisi PKn (sebagai wadah formal pendidikan politik) perlu membuka mata lebar-lebar terhadap wacana pendidikan yang bernuansa PKn

---

walaupun berada di luar jalur formal, dalam hal ini seperti pendidikan politik di pondok pesantren *salafiyah*. Akan terasa kurang bermakna, jika PKn hanya membatasi dan memperhatikan pendidikan politik pada jalur formal saja, karena upaya membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) sebagai misi utama PKn harus dilakukan secara simultan baik melalui jalur formal, informal, maupun nonformal termasuk pondok pesantren. Demikian pula pendidikan IPS harus melakukan hal yang sama, karena upaya membekali keterampilan sosial peserta didik sebagai salah satu misi utamanya akan lebih terlatih/terasa apabila berhadapan langsung dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk di pondok pesantren.

9. Akhirnya perlu peneliti kemukakan, bahwa kesimpulan di atas tidak dapat digeneralisir untuk kasus yang sama dengan objek yang berbeda, karena sebagaimana dikemukakan oleh Sukanto (1999:327), bahwa: “Tidak mudah melakukan analisis sosial terhadap fenomena perubahan sosial keagamaan di pondok pesantren yang berakhir dengan kesimpulan umum, karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri”. Demikian pula penelitian ini hanya merupakan kegiatan awal dari penelitian terhadap pendidikan politik di pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri’. Keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dipaparkan di atas, memberikan penegasan bahwa masih banyak hal lain yang dapat dikaji oleh peneliti-peneliti berikutnya dengan spektrum yang lebih luas, antara lain tentang peranan sosial politik para alumni pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri’ di masyarakat.